

**PENGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI
SUMATERA UTARA**

Oktarini Khamilah Siregar, SE, M.Si

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Putra Alfi Ramadhan

Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRACT

*This research is to find out the Effect of Regional Expenditures, Regional Original Revenue and Economic Growth on the Ministry of Religion in District and City Governments in North Sumatra. The type of data used is secondary data. The population in this study were 33 regency and city governments in North Sumatra Province, so that the sample analysis unit was 30 research samples (6 districts / cities X 5 years) namely Langkat Regency, Deli Serdang Regency, Serdang Bedagai Regency, Karo Regency, Medan City and The city of Binjai and research were taken from 2013 to 2017. This research was conducted at the Central Sumatra Provincial Statistics Agency (BPS) on No. 1 Dormitory street. 179 Medan. The results of this study according to the hypothesis test show that partially (*t* test) Regional Expenditures have a significant effect on Poverty In District and City Governments in North Sumatra and Regional Original Income and Economic Growth have no significant effect on Poverty in District and City Governments in North Sumatra. But simultaneously (*f* test) shows that Regional Expenditures, Regional Original Income and Economic Growth have a significant effect on Poverty in District and District ta in North Sumatra.*

Keywords: *Regional Expenditure, Regional Original Revenue, Economic Growth and Poverty*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan pergeseran sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Dengan sistem desentralisasi yang mengedepankan prinsip otonomi daerah ini, maka menuntut semua pihak untuk melakukan perubahan dan pemahaman tentang tugas dan kewenangan pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi yang luas dan bertanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Otonomi daerah adalah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. tujuannya demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan dalam daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menurunnya pengangguran dan kemiskinan juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang di atur dalam Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat (1), keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat. Penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil analisis terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2009)

Berbagai kegiatan pembangunan nasional dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan ke daerah-daerah, khususnya pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Pembangunan sendiri dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang nasional. Indikator utama keberhasilan pembangunan nasional salah satunya adalah menurunnya jumlah penduduk miskin Indonesia. Kemiskinan merupakan musuh dari tujuan otonomi daerah. Dimana, pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, baik itu di negara maju maupun Negara berkembang. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena hingga kini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah. Masalah kemiskinan di Indonesia cukup rumit karena luas wilayah, beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat, dan pengalaman kemiskinan yang berbagai. Selain itu, masalah kemiskinan juga bersifat multidimensional karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, tetapi juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin, kegagalan dalam pemenuhan hak dasar.

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia. Menurut Badrul Munir (2010), suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita rendah, mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah negara Indonesia, dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah pesat, padahal sebelumnya jumlah penduduk miskin terus berkurang. Secara Pemerintahan pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara juga memiliki jumlah Penduduk miskin yang tercatat pada tahun 2017 di antaranya pada Kab.Langkat sebesar 114.410 Jiwa pada Kab. Deli Serdang sebesar 97.090 Jiwa pada Kab. Serdang Bedagai sebesar 56.930 Jiwa pada Kab. Karo sebesar 40.020 Jiwa pada Kota Medan sebesar 204.220 Jiwa dan pada Kota Binjai sebesar 18.230 Jiwa.

Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun. Namun jumlah penduduk miskin Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan. Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas termasuk bagi pemerintahan pada Sumatera Utara. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah Pendapatan dari Realisasi Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sebagaimana dalam Jenis-jenis Belanja daerah terdiri dari : Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung. Realisasi Belanja Daerah yang di dapatkan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara yang tercatat pada tahun 2017 di antaranya pada Kab.Langkat sebesar Rp. 2.320.218.855.000,- pada Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 3.377.738.242.000,- pada Kab. Serdang Bedagai sebesar Rp. 1.390.897.227.000,- pada Kab. Karo sebesar Rp. 1.520.826.759.000,- pada Kota Medan sebesar Rp. 4.525.231.332.000,- dan pada Kota Binjai sebesar Rp. 849.614.205.000,-. Realisasi pendapatan yang di dapatkan dapat memenuhi semua kebutuhan pembiayaan suatu daerah. Mengapa belanja daerah menjadi salah satu tolak ukur dari penurunan jumlah penduduk miskin di pemerintahan di Sumatera Utara di karenakan Realisasi belanja daerah yang di dapatkan di suatu daerah dapat membantu perekonomian dan pembangunan di suatu daerah maka belanja daerah dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di pemerintah Sumatera Utara.

Realisasi dari Pendapatan Asli Daerah yang di dapatkan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang di dapatkan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara yang tercatat pada tahun 2017 di antaranya pada Kab.Langkat sebesar Rp. 139.717.648.000,- pada Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 849.286.151.000,- pada Kab. Serdang Bedagai sebesar Rp. 103.711.290.000,- pada Kab. Karo sebesar Rp. 157.866.721.000,- pada Kota Medan sebesar Rp. 1.739.756.923.000,- dan pada Kota Binjai sebesar Rp. 139.217.622.000,-. Realisasi pendapatan yang di dapatkan dapat memenuhi semua kebutuhan pembiayaan suatu daerah. Begitu juga pada pendaptan yang di peroleh dari Pendapatan Asli Daerah mengapa, pendapatan asli daerah juga termasuk salah satu yang dapat menurunkan jumlah penduduk miskin pada pemerintah sumatera utara di karenakan hasil yang di peroleh dari jenis-jenis yang terdapat di dalam Pendapatan Asli daerah. Seperti pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dari pendapatan yang di hasilkan oleh jenis-jenis PAD tersebut dapat membantu membangun pembangunan di suatu daerah tersebut.

Dan Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2017 pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara, Antara lain: Kab. Langkat sebanyak 5.050 Jiwa, Kab. Deli. Serdang sebanyak 5.100 Jiwa, Kab. Serdang. Bedagai sebanyak 5.160 Jiwa, Kab. Karo sebanyak 5.210 Jiwa, Kota Medan sebanyak 5.810 Jiwa dan Kota Binjai sebanyak 5.390 Jiwa. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi suatu tolak ukur untuk menurunkan jumlah penduduk miskin pada pemerintah sumatera utara dikarenakan pertumbuhan ekonomi itu komponen penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunnn ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan dalam daerah tersebut.

Didalam angka tingkat Kemiskinan pasti Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi menjadi yang sangat berpengaruh di angka tingkat Kemiskinan.. Pada perinsipnya semangkin besar sumbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap suatu daerah akan menunjukkan semangkin kecil jumlah penduduk miskin di suatu daerah tersebut.

Dan tujuannya dalam arti luas untuk pembangunan dan kemajuan daerah tersebut. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat sebagai pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara Parsial dan Simultan terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara ?

1.3 Tujuan Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara Parsial dan simultan terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara .

II. Tinjauan Pustaka

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan musuh dari tujuan utama otonomi daerah. Dimana, pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Menurut Bappenas tahun 2004 kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat di hindari oleh seorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Sedangkan

menurut Ritonga 2010 menyatakan bahwa “Kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang di perlukan oleh penduduk atau rumah tangga”. Adapun hak – hak dasar tersebut antar lain :

- a. Terpenuhinya kebutuhan pangan.
- b. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan.
1. **Rasa** aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan,.
- c. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Penyebab kemiskinan dibagi menjadi dua golongan antara lain :

1. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya.
2. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang timpang, baik karena perbedaan kepemilikan, kemampuan, pendapatan dan kesempatan kerja yang tidak seimbang maupun karena distribusi pembangunan dan hasilnya yang tidak merata.

2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Pada Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung dari 1 Januari sampai 31 Desember”. Sedangkan menurut Halim (2009), “APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya merupakan batas maksimal untuk satu periode anggaran. Adapun struktur APBD berdasarkan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari 3 bagian yaitu: Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pembiayaan Daerah.

a. Belanja Daerah

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 “Belanja daerah merupakan Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam priode satu tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Yuwono dkk, 2010 menyatakan bahwa “Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.Jenis-jenis Belanja Daerah adalah

a) Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, sehingga kelompok belanja tersebut ditemui diseluruh SKPD sebagai pengguna anggaran. Kelompok Belanja Langsung dibagi menurut Jenis Belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja modal.

b) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang penganggarnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik. Kelompok Belanja Tidak Langsung dibagi menurut Jenis Belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

Beberapa belanja daerah yang menjadi tolak ukur untuk mengukur jumlah angka kemiskinan di suatu daerah antara lain :

1. Belanja Daerah Urusan Pendidikan
2. Belanja Daerah Urusan Kesehatan
3. Belanja Daerah Urusan Pekerjaan Umum
4. Belanja Daerah Urusan Pekerjaan Pertanian

b. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah Pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah terdiri dari penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah Menurut Undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

b) Retribusi Daerah

Menurut Suparmoko (2009) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri atas :

- 1) Penerimaan Pembiayaan yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman dan Obligasi, Hasil Penjualan Aktiva Daerah yang Dipisahkan, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
- 2) Penerimaan Piutang Daerah
Pengeluaran Pembiayaan yang mencakup Pembentukan Dana, Investasi (Penanaman Modal) Pemerintah Daerah, Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka terdiri dari Investasi Permanen dan Non Permanen
- 3) Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah yaitu Sisa Lebih Pendanaan Anggaran Tahun Berjalan

2. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut ekonomi klasik pertumbuhan ekonomi itu pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi antara lain jumlah penduduk, jumlah stok barang dan modal, luas tanah dan kekayaan alam dan tingkat teknologi yang digunakan

Menurut Kuznets (2009) Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja, Akumulasi Modal dan Kemajuan Teknologi

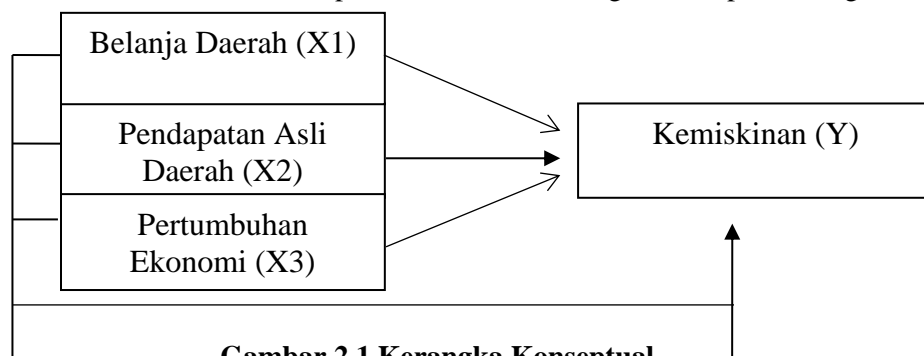
Dengan adanya pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaknya menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin (*growth with equity*).

2.2 Kerangka Konseptual

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Didalam Belanja Daerah terdiri dari : Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang di

peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah terdiri dari penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Adapun tujuan Pendapatan Asli Daerah adalah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pertumbuhan Ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja, Akumulasi Modal dan Kemajuan Teknologi.

Sedangkan Kemiskinan merupakan musuh dari tujuan utama otonomi daerah. Dimana, pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Dari uraian diatas, maka penulis membuat kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

III. METODE PENELITIAN

Model Analisis Data yang digunakan penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Dan Untuk Memprediksi nilai variabel positif dan negatif dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan berskala interval atau rasio. Rumus regresi linier sederhana adalah :

$$K = \beta_0 + \beta_1 BD + \beta_2 PAD + \beta_3 PE + e$$

Keterangan :

- K = Jumlah Penduduk Miskin
 β_0 = Konstanta
 β_1 BD = Belanja Daerah
 β_2 PAD = Pendaptan Asli Daerah
 β_3 PE = Pertumbuhan Ekonomi
 e = Error

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji normalitas

Uji normalitas dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Kolmogrov-Smirnov*. Uji normalitas menggunakan tingkat signifikansi 5%. Berikut ini tabel Uji Normalitas Adalah :

**Tabel 4.2 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

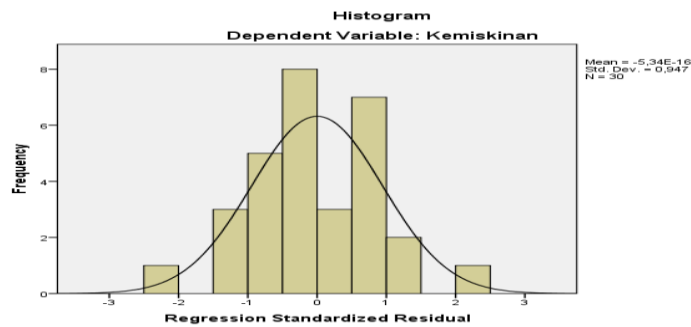
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	23271,97052238
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,071
	Negative	-,089
Kolmogorov-Smirnov Z		,487
Asymp. Sig. (2-tailed)		,972

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : diolah SPSS 21, 2019

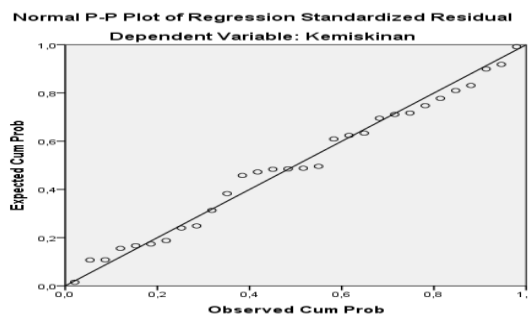
Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,972 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini berdistribusi normal.



Gambar 4.1 Histogram

Sumber : diolah SPSS 21, 2019

Garis histogram di atas menunjukkan data berdistribusi normal. Hal ini juga ditunjukkan pada hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik P-Plot yang terlihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : diolah SPSS 21, 2019

Gambar 4.2 Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual

Dari gambar scatterplot diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tidak membentuk pola tertentu atau tidak beraturan, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini membuktikan bahwa pada model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen (Y adalah Kemiskinan) berdasarkan independen (X adalah Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Berikut ini tabel Uji Multikolinearitas adalah

Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Belanja Daerah	,492	2,032
Pendapatan Asli Daerah	,494	2,024
Pertumbuhan Ekonomi	,994	1,006

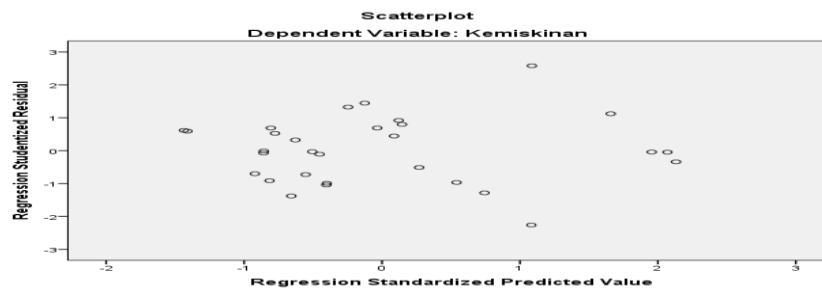
a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber : diolah SPSS 21, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada interaksi variabel belanja daerah, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera utara karena masing-masing nilai *tolerance* berada di atas 0,10 dan juga nilai *VIF* yang berada dibawah 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu observasi yang lain. Berikut ini tabel Uji Heteroskedastisitas adalah :

**Gambar 4.3 Scatterplot**

Sumber : diolah SPSS 21, 2019

Dari hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Berikut ini tabel Uji Autokorelasi adalah :

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2,118

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi , Pendapatan Asli Daerah , Belanja Daerah

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber : diolah SPSS 21, 2019

Dalam penelitian ini karena menggunakan $n=30$, $k=3$, hasil uji autokorelasi didapatkan nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 2,118, sesuai dengan tabel *Durbin Watson* pada level of signifikansi 0.05 maka diketahui $DL = 1,2138$, $DU = 1,6498$, $4-DU = 2,3502$, dan $4-DL=2,7862$.

Nilai *Durbin Watson* (DW) terletak antara batas atas atau *Upper Bound* (du) dan 4-du, yaitu $1,6498 < 2,118 < 2,7862$. Maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, yang mengindikasikan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji parsial, uji simultan dan uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut.

a. Uji Parsial

Hasil uji parsial untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap dependen dapat dilihat pada tabel berikut ini adalah

**Tabel 4.5 Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1594,679	19114,049		,083	,934
1 Belanja Daerah	4,013E-008	,000	,818	7,892	,000
Pendapatan Asli Daerah	1,729E-008	,000	,149	1,438	,162
Pertumbuhan Ekonomi	-292,675	3103,945	-,007	-,094	,926

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber : diolah SPSS 21, 2019

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui persamaan regresi linier bergandanya, yaitu:

$$K = 1594,679 + 4,013BD + 1,729PAD + -292,679PE$$

Dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen adalah Nilai signifikansi t belanja daerah diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$, dengan nilai $t_{hitung} = 7,892$. Uji yang dilakukan dua arah untuk mengetahui belanja daerah berpengaruh atau tidak secara parsial terhadap kemiskinan. Maka diperoleh $t_{hitung} = 7,892 > 2,05553 t_{tabel}$, maka H_1 diterima artinya belanja daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Nilai signifikansi t pendapatan asli daerah diperoleh sebesar $0,162 > 0,05$, artinya pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Maka di peroleh nilai $t_{hitung} = 1,438$. Uji yang dilakukan dua arah untuk mengetahui belanja daerah berpengaruh atau tidak secara parsial terhadap kemiskinan. Maka diperoleh $t_{hitung} = 1,438 < 2,05553 t_{tabel}$, maka H_2 ditolak artinya pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Dan nilai signifikansi t pertumbuhan ekonomi diperoleh sebesar $0,926 > 0,05$, artinya pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Sehingga diperoleh nilai $t_{hitung} = -0,094$. Uji yang dilakukan dua arah untuk mengetahui belanja daerah berpengaruh atau tidak secara parsial terhadap kemiskinan. Maka diperoleh $t_{hitung} = -0,094 < 2,05553 t_{tabel}$, maka H_3 ditolak artinya pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

b. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2016) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Berikut hasil uji simultan adalah

Tabel 4.6 Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	98680577638,831	3	32893525879,610	54,453	,000 ^b
Residual	15705953747,836	26	604075144,148		
Total	114386531386,667	29			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber :diolah SPSS 21, 2019

Dari uji SPSS di peroleh nilai $f_{hitung} = 54,453$. Uji yang dilakukan dua arah untuk mengetahui belanja daerah berpengaruh atau tidak secara parsial terhadap kemiskinan. Maka diperoleh $f_{hitung} = 54,453 > 2,98 t_{tabel}$, maka artinya hasil uji F menunjukkan variabel independen secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di sumatera utara.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,929 ^a	,863	,847	24577,940

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah , Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber : diolah SPSS 21, 2019

Berdasarkan table 4.7 diatas, besarnya nilai R Square (R^2) adalah 0.863 yang berarti sebesar 0.863 atau (86,3%) variabel independen belanja daerah, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi, mampu menjelaskan kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di sumatera utara. Sedangkan sisanya sebesar 13,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian seperti kinerja keuangan, tingkat pengangguran, inflansi, kurs, dana alokasi umun, belanja langsung, dana bagi hasil, dan masih banyak lagi yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.2 PEMBAHASAN

Pembangunan nasional dapat terwujud karena tujuan pemerintah tercapai dalam pengendalian kemiskinan yang ada di Indonesia. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara merupakan faktor dominan dalam penanggulangan kemiskinan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa belanja daerah secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di sumatera utara. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di sumatera utara. Secara teoritis Belanja daerah merupakan Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam priode satu tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Yuwono dkk, 2010 menyatakan bahwa “Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Dengan kata lain suatu daerah bisa menurunkan tingkat kemiskinan pada daerah tersebut jika belanja daerah itu digunakan dalam hal peningkatan kualitas atau taraf hidup masyarakat pada daerah tersebut atau dengan menggunakan belanja daerah tepat sasaran, belanja daerah juga bisa menambah jumlah kemiskinan jika alokasi yang digunakan tidak sesuai sasaran. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu Rendy (2016) yang menjelaskan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di sumatera utara.

Pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di sumatera utara. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di sumatera utara. Secara teoritis, Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut undang-undang

Nomor 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah terdiri dari penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Semakin besar jumlah pendapatan suatu daerah maka semakin rendahlah tingkat kemiskinan yang ada pada daerah tersebut, namun ada beberapa hal yang mungkin bisa mengakibatkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan pada penelitian ini diantaranya yaitu tata kelola pendapatan suatu daerah itu yang mungkin belum tepat sasaran sehingga pendapatan asli daerah belum bisa menurunkan tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Andyka (2015) yang menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Secara teoritis, Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja, Akumulasi Modal dan Kemajuan Teknologi. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat maka tingkat kemiskinan pada daerah tersebut akan berkurang, sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah menurun maka tingkat kemiskinan suatu daerah itu juga akan semakin bertambah. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aswar (2016) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Belanja daerah, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Hasil uji F dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja daerah, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa belanja daerah, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama dapat mempengaruhi kemiskinan pada pemerintah dan kota di Sumatera Utara, maka dari itu untuk pemerintah daerah seharusnya lebih teliti dalam hal menggunakan anggaran belanja daerah dengan cara mengeluarkan anggaran belanja daerah hanya untuk kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, karena dengan adanya belanja daerah yang tidak terlalu penting dapat menambah tingkat kesulitan bagi masyarakat. Begitu juga dengan pendapatan daerah yang harus bisa digunakan untuk hal-hal yang khususnya dapat berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, dan yang terakhir pertumbuhan ekonomi hal ini bisa terjadi jika taraf hidup masyarakat di suatu daerah sudah tercukupi maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa dikatakan baik.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah Secara Parsial (Uji t) dapat diambil kesimpulan bahwa Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara dan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Secara Uji Simultan (Uji F) dapat diambil kesimpulan bahwa Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Dan Besarnya nilai R Square (R^2) atau koefisien determinasi adalah 0,863 yang berarti sebesar 0,863 atau (86,3%) variabel independen Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi, mampu menjelaskan Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Sedangkan sisanya sebesar 13,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian seperti kinerja keuangan, tingkat pengangguran, inflansi, kurs, dana alokasi umum, belanja langsung, dana bagi hasil, dan masih banyak lagi yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Dari beberapa pembahasan diatas peneliti ingin memberikan saran agar bisa dijadikan bahan pertimbangan. Berdasarkan hasil dari analisis rasio dan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran terhadap pemerintah pada kabupaten dan kota di Sumatera utara adalah Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar lebih memperbanyak sampel dengan data panel untuk di teliti selanjutnya . Untuk Pemerintah harus membuat sebuah kebijakan dan mengambil perananan yang cukup besar untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dengan menaikkan kapasitas produksi masyarakat agar mengurangi jumlah penduduk miskin pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera utara. Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara disarankan lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam mengalokasikan Belanja Daerah diharapkan Pemerintah Daerah melaksanakannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pemerintah daerah juga harus segera mengupayakan cara dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang bersumber dari pemerintah pusat, selain itu optimalisasi tersebut juga akan berguna bagi kemandirian daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Rendy Bayu (2016). *Pengaruh Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan (Studdi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)*.
- Bappenas.(2004). *Kemiskinan..*
- Dwirandra dan Ani (2014). *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Pekanbaru.*
- Erlina, Sri Mulyani, (2010). *Metode Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen, Cetakan Pertama, USU Press, Medan.*
- Ghozali, Imam, (2016). *Metode Penelitian : Teori Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas di Ponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuznets, Simon (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi : Cakrawala Ekonomi*, Jakarta
- Munir, Badrul (2010). *Teori Faktor Kemiskinan : Cakrawala Ekonomi*, Jakarta
- Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010.Tentang *Standar Belanja Daerah*.
- Prapto, Andyka Arief (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan Dki Jakarta.*
- Ritonga, (2010). *Teori Kemiskinan*, Cetakan Ketiga,, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Sakirno, Sadono. (2013). *„Makro Ekonomi Teori Pengantar (edisi ketiga PT Rajagrafindo Persada, Jakarta)*.
- Sugiyono, (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kesembilan, CV Alfabete, Bandung.
- Suparmoko. (2009). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Talib, Aswar (2016). *Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Pinrang.*
- Todaro, M.P & S.C. Smith. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 tentang Belanja Daerah Urusan Kesehatan*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional dalam Belanja Daerah Urusan Pendidikan*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang *Ketenagalistrikan*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah..*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Pendapatan Asli Daerah*.

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang *Teori Infrastruktur Jalan dalam Belanja Daerah Urusan Pekerjaan Umum*.
- Wauran, Amran Naukoko Patrick dan Paseki Meilen Greri (2014). *Pengaruh Dana LAokasi Umum dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012*.
- Wibowo, M. E. (2014). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Tingkat Kemiskinan*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Yuwono, Sony, Dkk. (2010). *Penganggaran Sektor Publik*. Bayumedia Publishing, Bandung.